

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak adalah amanah dan juga karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk umatnya yang sudah dipilih. Oleh karena itu wajib disyukuri, dilindungi dan dijaga kehormatan martabat serta harga dirinya secara wajar dan proporsional. Perlindungan terhadap anak meliputi berbagai aspek baik hukum, ekonomi, politik, sosial maupun budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Setiap manusia tanpa terkecuali memiliki hak dan kewajibannya, sebagai anak yang memiliki hak senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat hak-hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, salah satu momen penting yang menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Mei Tahun 2002 yang mengadopsi laporan Ad Hoc pada sesi khusus untuk anak. Dokumen itulah kemudian dikenal dengan "*A World Fit For Children*". Judul dokumen tersebut menunjukkan gaung puncak dari rangkaian upaya dunia untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah masa depan bumi. (Sumber: 1. http://www.unicef.org/specialsession/docs_new/documents/A-RES-S27-2E.pdf/ 2. <http://suaka.or.id/public-awareness/human-rights-framework/>)

Kelangsungan hidup manusia akan lebih berusaha untuk menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik melalui anak-anak. Dalam hal tersebut Indonesia menetapkan sebuah aturan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada pasal 1 ayat 1 bahwa anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Pada ayat 2 berisi tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Sumber: <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/98588/117398/F1211362854/IDN98588%20Idn.pdf>)

Beberapa pandangan tentang masa anak-anak yang membentuk pandangan dunia modern pada umumnya menganut pandangan yang instrumentalistik. John Locke misalnya melihat alam pikiran anak itu sebagai kertas kosong yang menanti untuk ditulisi oleh pengalaman dan refleksi, atau suatu bejana kosong yang menanti untuk diisi. JJ.Rousseau melihat masa anak-anak sebagai suatu “defisit” yang akan terbayarkan pada waktu anak menjadi dewasa. Jean Piaget berpendapat bahwa anak tidak saja tahu lebih sedikit dari orang dewasa, tetapi juga berfikir secara berbeda. Dalam perkembangannya sewaktu anak menjadi lebih berumur, dia akan memperoleh kemampuan kognitif yang lebih banyak yang merupakan tanda kedewasaan. Disamping pandangan teoritis seperti itu, di Indonesia masalah anak saat ini masih dilihat bukan karena masalah yang krusial, melainkan hanya karena ”sedang musim dibicarakan”. Isu anak tak masuk dalam agenda politik dan partai

politik serta tak pernah dibicarakan di DPR, karena tak bisa dijadikan tenaga pendukung politik. Hal tersebut dinilai tak menarik (*non-marketable*) dan tidak diacuhkan karena dianggap “biayanya melebihi manfaat dan kegunaanya”.
(Sumber:<http://www.zonasiswa.com/2014/07/pengertian-hak-asasi-manusia-ham.html>)

Mengacu kepada Konvensi Hak Anak (KHA) pasal 3 ” Kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama”. Namun, hal ini masih sulit diimplementasikan. Jadi anak hanya ada dalam anggapan dan tidak pernah diutamakan secara sadar dan sengaja sebagai wawasan pembangunan dan bukan subyek pembangunan. Mereka hanya menjadi indikator pembangunan seperti angka kematian bayi, angka kematian balita dan anak, derajat partisipasi dalam pendidikan.

(Sumber:http://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC_bahasa_indonesia_version.pdf)

Pada era globalisasi, permasalahan anak di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Permasalahan yang serius adalah jumlah kasus pelanggaran hak anak yang terus meningkat, seperti kasus yang sering terjadi diantaranya penelantaran anak, perdagangan, eksploitasi, pencabulan bahkan pembunuhan. Seolah-olah seperti fenomena gunung es, munculnya data di setiap instansi hanyalah sebatas kejadian di atas permukaan, sehingga belum menemukan secara spesifik jumlah kasus yang terjadi di tingkat desa, yang di daerah pelosok dan tertinggal. Komisi Nasional Perlindungan Anak merilis ada 21.689.987

pengaduan pelanggaran anak yang tersebar di 33 provinsi dan 202 kabupaten/kota selama tahun 2011-2015 dan 58% diantaranya adalah kejahatan seksual. (sumber:<https://beritagar.id/artikel/berita/darurat-kekerasan-anak-jumlah-kasus-terus-meningkat>)

Pada dasarnya lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perlindungan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat memiliki tujuan dan tugas memberikan perlindungan anak dari berbagai bentuk tindak kekerasan. Sinergitas berbagai kebijakan dan program dari masing-masing kementerian dan lembaga masyarakat, memiliki misi memberikan perlindungan bagi anak dari berbagai bentuk tindak kekerasan. Hasil pantauan yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun 2011 hingga tahun 2015 terjadi peningkatan yang signifikan kasus kekerasan terhadap anak.

Tabel 1. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia	2178	3512	4311	5066	6006

(sumber data: www.KPAI.go.id) tahun 2016

Salah satu sinergitas kegiatan antar kementerian/lembaga telah dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Survei Kekerasan Terhadap Anak (SKTA) pada Tahun 2013 lalu. Kegiatan survei tersebut merupakan kerjasama lintas kementerian/lembaga dan NGO yaitu dimana Kementerian Sosial (Kemos),

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Bappenas, BPS dan Unicef. Secara substansial, pelaksanaan survei (khususnya yang terkait dalam pengumpulan data) telah berlangsung sukses, dengan memperhatikan etika dan perlindungan anak selama pengambilan data. Pada protokol survei mencantumkan perlunya memperhatikan efek yang tidak menyenangkan dan proses rujukan.

(Sumber:<http://puslit.kemosos.go.id/upload/post/files/7ba4c5f20e68d711d1c4d9e2ee97f330.pdf>)

Pola pikir yang terbentuk pada masyarakat bahwa adanya korban kekerasan adalah aib bagi keluarga dan masyarakat, sehingga untuk melaporkan ke pihak-pihak terkait dirasa malu dan sesuatu yang tabu. Mengingat bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta bentuk-bentuk eksploitasi baik ekonomi, seksual, penelantaran, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya, maka hal tersebut menjadikan lembaga pemerintah dan non-pemerintah memusatkan perhatian untuk fokus dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa mewajibkan kepada Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua untuk bertanggung jawab menyelenggarakan perlindungan anak terutama dari kekerasan. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk membantu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan anak dari kekerasan, maka diperlukan adanya pedoman tentang Penanganan Anak Korban Kekerasan. Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan meliputi:

- a) Pelayanan identifikasi,
- b) Rehabilitasi kesehatan,
- c) Rehabilitasi sosial,
- d) Pemulangan,
- e) Bantuan hukum,
- f) Reintegrasi sosial.

Berdasarkan pedoman tersebut, kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI) membentuk lembaga pemerintah yang diberi nama Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) dan menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. (Sumber: <https://www.scribd.com/doc/76757243/Permeneg-PP-PA-No-2-Thn-2011-Pedoman-Penanganan-Anak-Korban-Kekerasan-Ok>)

Mengacu pada peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, pemerintah DIY menginisiasi untuk membentuk lembaga fungsional non struktural Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami”. P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” yang diatur dalam peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012, dipimpin oleh seorang direktur yang berada di bawah tanggung jawab Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY. P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu

kepada perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan panduan dan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh KPPPA RI.

P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” melakukan uji ISO 9001:2008, hal ini merupakan standar internasional di bidang sistem manajemen mutu. Suatu lembaga/organisasi yang telah mendapatkan akreditasi (pengakuan dari pihak lain yang independen) ISO tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal manajemen penjaminan mutu produk/jasa yang dihasilkannya. Berdasarkan penerapan yang efektif dan dibuktikan dengan hasil audit yang memuaskan pada tanggal 26 Oktober 2015, P2TPAKK ”Rekso Dyah Utami” telah lulus uji dan berhak menerima sertifikat ISO 9001:2008 dari *Worldwide Quality Assurance – Asia Pasific An Agency of Worldwide Quality Assurance Limited – UK (WQA - APAC)*. (sumber data: wawancara dengan relawan bagian pemulangan “Rekso Dyah Utami” pada tanggal 23 Agustus 2016 pukul 14.45 wib)

Tabel 2. Jumlah kasus korban kekerasan yang ditangani oleh lembaga “Rekso Dyah Utami” di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan wilayah:

WILAYAH	TAHUN					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Yogyakarta	35	48	36	49	29	72
Bantul	24	15	34	33	30	56
Kulonprogo	4	5	5	5	7	5
Gunungkidul	3	-	2	6	6	6
Sleman	52	48	31	35	42	55

Lain-lain	8	8	5	14	6	10
Jumlah total	126	124	133	142	120	204

(sumber data: hasil observasi wawancara dengan salah satu anggota pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” tanggal 11 bulan April tahun 2016 dan <http://reksodyahutami.blogspot.co.id/>)

Tabel 3. Jumlah kasus korban kekerasan yang ditangani lembaga “Rekso Dyah Utami” di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan jenis kekerasan:

KATEGORI KASUS	TAHUN					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kekerasan terhadap istri	50	57	49	75	70	85
Kekerasan terhadap anak	21	28	12	21	24	60
Perkosaan	8	1	8	4	4	3
Kekerasan dalam pacarana	6	4	7	13	8	19
Kekerasan dalam rumah tangga	31	30	56	20	11	9
Lain-lain	10	4	1	9	3	6
Jumlah total	126	124	133	142	120	204

(sumber data: hasil observasi wawancara dengan salah satu anggota pengurus P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” tanggal 11 bulan April tahun 2016 dan <http://reksodyahutami.blogspot.co.id/>)

Di setiap tahunnya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY membuat perencanaan program yang diperuntukkan khusus P2TPAKK “Rekso Dyah utami” ke Negara, untuk mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, pada implementasinya bahwa apa yang direncanakan dan APBD yang diajukan kurang bermanfaat dan tidak tepat, karena perencanaan yang kurang matang sehingga kuota yang ada tidak dapat menampung keseluruhan

korban yang ada. Ada pula anggaran yang tidak dibelanjakan karena tidak sesuai kebutuhan yang ada.

Perjalanannya dalam meraih penghargaan tampaknya kurang sejalan dengan manajemen yang baik pada P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”. Pasalnya banyak permasalahan di lapangan baik dari pihak korban dan dari pihak lembaganya sendiri keutamaan dalam komunikasi diantaranya:

- a) Tidak adanya komunikasi dua arah yang baik saat penanganan korban kekerasan terhadap anak. Saat salah satu pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” melakukan proses penggalian informasi kepada korban, tidak mendapatkan informasi secara lengkap dari korban. Korban masih takut untuk menceritakan kejadian yang dialaminya.

(Sumber: wawancara dengan salah satu anggota pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” pada tanggal 16 September 2016 pukul 18.30 wib)

- b) Korban merasa kurang nyaman dan takut untuk bercerita kepada orang yang memintanya bercerita atas kejadian yang dialaminya, karena korban merasa seperti “di sidang”, menggunakan nada yang kurang nyaman dan pesan yang kurang bersahabat.

(Sumber: wawancara dengan korban yang berinisial “C” di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” pada tanggal 27 September 2016 pukul 19.30 wib)

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dimana saja (ditempat umum, di sekolah, di lingkungan keluarga (rumah tangga) dan lain-lainnya). Kekerasan terhadap anak dapat dilakukan oleh siapa saja (orang tua, saudara laki-laki ataupun perempuan dan lain-lainnya serta dapat terjadi kapan saja (siang dan malam). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh PBB dalam Laporan Pakar Independen untuk Studi Mengenai Kekerasan Terhadap Anak PBB, menyatakan bahwa adanya tingkatan kekerasan terhadap anak yaitu (1) kekerasan seksual, (2) kekerasan fisik, (3) kekerasan psikologis. Segi tingkatan tersebut dihitung berdasarkan dampak yang dialami oleh anak. (sumber: wawancara bapak Usman Basuni Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan KPPPA RI pada tanggal 15 November 2016). Kekerasan seksual meliputi pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi dan lain-lain. Pencabulan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti perlakuan atau melakukan tindakan yang buruk atau tidak senonoh terhadap orang lain. Kekerasan terhadap anak yang menjadi fokus dalam penelitian ini yakni kekerasan anak korban pencabulan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, untuk itulah penelitian skripsi ini dilakukan dengan harapan untuk mengetahui sejauh mana lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” selaku lembaga negara dalam melakukan pola komunikasi korban kekerasan pencabulan terhadap anak.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana strategi komunikasi lembaga “Rekso Dyah Utami” sebagai relawan mediator dalam penanganan kasus korban kekerasan pencabulan terhadap anak?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana strategi komunikasi yang digunakan oleh lembaga “Rekso Dyah Utami” selaku lembaga pemerintah sebagai mediator dalam penanganan kasus korban kekerasan pencabulan terhadap anak.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi kepada pihak-pihak terkait dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada praktisi humas, khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga pemerintah lainnya dalam penanganan kasus korban kekerasan pencabulan terhadap anak untuk memaksimalkan fungsi manajemen.
3. Sebagai bahan evaluasi kepada praktisi humas, khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga pemerintah lainnya dalam penanganan kasus korban kekerasan pencabulan terhadap anak.

E. KAJIAN TEORI

1. Strategi Komunikasi

Komunikasi mempunyai dua sifat umum, yaitu langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung berupa proses tatap muka (*face to face*)

antara manusia satu dengan yang lain. Berbeda dengan komunikasi langsung, dalam komunikasi tidak langsung manusia memerlukan perantara atau media untuk menghubungkan manusia satu dengan manusia lain, misalnya : TV, internet, surat kabar, dan lain-lain. Dari dua sifat di atas, komunikasi dibagi kembali menjadi dua sifat, yaitu verbal dan non verbal. Komunikasi verbal berupa percakapan lisan (*oral*) dan tulisan (*written*). Sedangkan komunikasi nonverbal dapat berupa bahasa tubuh (*gesture*, gambar, warna, penampilan fisik, dan lain-lain).

Menurut Onong Uchjana Effendy (2003:32) dalam buku berjudul “Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi” menyatakan bahwa “Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Taktik operasional secara taktis harus dapat dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi”. Hal senada diungkapkan oleh Anwar Arifin (1984:10) dalam buku “Strategi Komunikasi” menyatakan bahwa “sesungguhnya suatu strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan, guna mencapai tujuan. Jadi merumuskan strategi komunikasi, berarti memperhitungkan kondisi dan situasi (ruang dan waktu) yang dihadapi dan yang akan kemungkinan dihadapi dimasa depan, guna mencapai efektivitas. Dengan strategi komunikasi ini, berarti dapat ditempuh beberapa cara

memakai komunikasi secara sadar untuk menciptakan perubahan pada diri khalayak dengan mudah dan cepat”.

Berdasarkan beberapa teori yang diungkapkan oleh para pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi bisa dibilang salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidak komunikasi yang dilakukan secara efektif. Sehingga strategi komunikasi ini memiliki dua fungsi utama. Memperluas pesan atau informasi sehingga dapat dihasilkan komunikasi yang persuasif, instruktif, sistemik, dan yang pasti sangat informatif untuk mendapat hasil optimal. Pada hakikatnya strategi adalah manajemen dan suatu perencanaan untuk mencapai suatu tujuan. Namun, untuk mencapai tujuan strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan untuk mengarahkan menuju tujuan, melainkan menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Demikian pula dengan strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen komunikasi (*management communication*) untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasional teknisnya yang harus dilakukan, dalam arti kata pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi. Sepertihalnya dengan strategi dalam bidang apapun. Strategi komunikasi harus didukung oleh teori. Karena teori merupakan pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah diuji pengalamannya.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa manajemen komunikasi adalah manajemen yang diterapkan dalam kegiatan komunikasi baik secara

individu maupun berkelompok. Oleh karena itu manajemen akan berperan penting sebagai penggerak aktivitas komunikasi dalam mencapai tujuan. Maka pelaku komunikasi setidaknya harus mengetahui seluk-beluk manajemen untuk menyukseskan penyelenggaraan komunikasi secara efektif

2. Perencanaan Komunikasi

Komunikasi merupakan unsur yang sangat penting dalam proses perubahan sosial. Kita sama-sama paham, secara sederhana komunikasi adalah proses di mana pesan-pesan dikirim dari sumber kepada penerima, baik secara langsung maupun melalui media tertentu. Dalam proses perubahan sosial, pesan-pesan yang terkandung dan dikirim oleh sumber kepada penerima itu berupa ide-ide pembaruan atau inovasi. Namun, unsur terpenting dalam sebuah komunikasi sebelum melakukan transfer pesan adalah melakukan perencanaan yang matang dalam komunikasi agar tidak terdapat *miss communication*. Dalam bukunya Hafied Cangara (2013:21-22) “Perencanaan dan Strategi komunikasi” mengungkapkan bahwa Perencanaan adalah suatu proses yang menetapkan kemana kita harus pergi dengan mengidentifikasi syarat apa yang harus dipenuhi untuk sampai ketempat tersebut dengan cara yang paling efisien dan efektif, atau dengan kata lain perencanaan sebagai penetapan spesifikasi tujuan yang ingin dicapai termasuk dengan cara-cara apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Menyusun perencanaan yang ideal untuk mendapatkan suatu perencanaan yang baik, maka diperlukan beberapa prinsip yang mendasari rencana tersebut:

- a) Prinsip partisipatif ialah sebuah rencana yang ideal harus dapat mendorong terciptanya partisipatif, baik dari pengelola maupun *stakeholder* yang menjadi target sasaran perencanaan tersebut.
- b) Prinsip kesinambungan ialah sebuah perencanaan dibuat tidak hanya untuk sesaat, melainkan harus mempertimbangkan proses kelanjutannya secara berkesinambungan, artinya rencana harus memiliki perhitungan bahwa perencanaan ini memiliki kelanjutan setelah dilakukan untuk jangka waktu tertentu.
- c) Prinsip holistik artinya menyeluruh dan tidak disusun berdasarkan unit-unit. Perencanaan tidak hanya dilihat dari satu sisi tetapi juga harus dilihat dari aspek dan keutuhan konsep secara keseluruhan

(Sumber: Hafied Cangara, 2013:32)

Perencanaan komunikasi dalam kerangka yang sangat sederhana dikaitkan dengan bagaimana menciptakan komunikasi yang efektif. Dalam kerangka yang lebih luas perencanaan komunikasi sangat diperlukan untuk menyusun strategi agar program yang berskala nasional bisa berhasil (Sumber: Onong Uchyana Effendi, 2000:43). Pendapat John Middleton dalam Hafied Cangara (2013:45) menyatakan bahwa perencanaan komunikasi adalah proses pengalokasian sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya tersebut tidak saja mencakup media massa dan komunikasi antar pribadi, tapi juga menciptakan keterampilan-keterampilan tertentu di antara individu dan kelompok dalam lingkup tugas-tugas yang dibebankan oleh organisasi. Hal senada juga diungkapkan oleh Robin Mehall

dalam Hafied Cangara (2013:45) menyatakan bahwa perencanaan komunikasi adalah sebuah dokumen tertulis yang menggambarkan tentang apa yang harus dilakukan yang berhubungan dengan komunikasi dalam pencapaian tujuan, dengan cara apa yang dapat dilakukan sehingga tujuan tersebut dapat dicapai, dan kepada siapa program komunikasi itu ditujukan, dengan peralatan dan dalam jangka waktu berapa lama hal itu bisa dicapai, dan bagaimana cara mengukur (evaluasi) hasil-hasil yang diperoleh dari program tersebut.

Berdasarkan beberapa teori yang diungkapkan oleh para pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan komunikasi adalah sebuah dokumen yang tertulis atau tidak, yang terdapat suatu ide-ide untuk menggambarkan tentang apa yang harus dilakukan, dalam pencapaian tujuan dengan cara apa yang dapat dilakukan dan kepada siapa rencana tersebut ditujukan, dengan peralatan maupun tidak dan dalam jangka waktu berapa lama rencana tersebut dapat dicapai. Pentingnya perencanaan komunikasi diperlukan untuk mengimplementasikan program-program atau suatu tindakan yang akan dicapai. Perencanaan komunikasi dalam rangka yang sangat sederhana sudah tentu di kaitkan bagaimana menciptakan komunikasi yang efektif.

3. Manajemen Komunikasi

Manajemen komunikasi sangat identik dengan interaksi sosial. Ada kalanya kita harus mampu untuk memposisikan diri dengan tepat dalam situasi tentunya, kita juga harus mampu menghadapi dan menjalin kerjasama dengan orang lain tanpa mencampurnya dengan urusan pribadi. Ini merupakan sebagian alasan diperlukannya sikap professional dalam diri kita masing-masing. Konsep manajemen dalam perspektif ilmu komunikasi pada hakikatnya dipahami sebagai proses mempengaruhi orang lain. Selain itu, konsep manajemen komunikasi juga memberi saran kepada kita bahwa kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik bukan hanya sebagai hal yang sudah melekat dalam diri kita saja, melainkan sebagai suatu hal yang dapat kita pelajari dan kita kembangkan. Sebagai contohnya, kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam komunikasi agar dapat menjadi seorang komunikator yang memiliki kredibilitas.

Disinilah letak kegunaan mempelajari manajemen komunikasi yang efektif. Manajemen komunikasi menurut Michael Kaye (1994:8) bagaimana individu atau manusia mengelola proses komunikasi melalui penyusunan kerangka makna dalam hubungannya dengan orang lain dalam berbagai lingkup komunikasi dengan mengoptimalkan sumberdaya komunikasi dan teknologi yang ada. Komunikasi merupakan hal yang terpenting dalam manajemen karena proses manajemen baru terlaksana, jika komunikasi dilakukan. Secara morfologis, terminologi komunikasi yang berasal dari Bahasa latin yaitu *communis* atau *coninaunicatio* yang berarti pemberitahuan, pemberian bagian (dalam suatu), dan pertukaran tempat pembicaraan

mengharapkan pertimbangan atau jawaban dari pendengarnya, kata sifatnya *communican* artinya berdialog, berunding, atau musyawarah (Anwar Arifin, 1998:19). Dalam Bahasa Inggris, *common* memiliki arti sama berkomunikasi yang berarti berusaha untuk mencapai kesamaan makna atau kesamaan arti (*Commonnes*). Proses komunikasi dapat dilihat dari unsur-unsur formula Lasswell yaitu *Who* (siapa pengirimnya/komunikator), *Say What* (apa yang dikatakan/pesan), *In Which Channel* (saluran komunikasi apa yang digunakan/media), *What Effect* (apa akibat yang ditimbulkan/efek) (Onong Uchyana Effendi, 1993:256).

Disamping itu untuk melakukan komunikasi yang efektif, dilakukan dengan menganalisa, menyalahkan, menghakimi, menasehati, dan menginterogasi, serta dibutuhkan keterampilan mendengarkan dan bertanya. Dalam proses berkomunikasi, seseorang harus mampu mendengarkan dan memahaminya dengan baik. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang saling memiliki keterkaitan dan mengarah pada suatu solusi. Sehingga tujuan utama dalam komunikasi yang efektif adalah sebuah winwin solution. Tak ada satupun orang yang mau disalahkan. Inilah konsep dasar dari komunikasi efektif.

Ketika ingin berkomunikasi dengan orang lain, kita melakukannya dengan efektif dalam kondisi apapun dan dibutuhkan kesiapan seseorang dalam menerima informasi atau pertanyaan dari kita. Dengan berkomunikasi efektif kita dapat menunjukkan kepribadian yang berkarakter positif dan membuka diri untuk selalu tumbuh dan berkembang menuju kesuksesan

secara bersama-sama. Komunikasi tidak efektif juga disebabkan karena kesalahpahaman dan ketidakpahaman individu dalam memahami informasi yang diterima. Kesalahpahaman tersebut menandakan adanya suatu yang mengganggu, baik dari penyampaian pesan yang disampaikan, maupun semua unsur komunikasi itu sendiri (Somad, 2014:135).

Berdasarkan beberapa teori yang diungkapkan oleh para pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen komunikasi ialah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengendalian faktor-faktor komunikasi seperti sumber, pesan, media, penerima, efek, dampak, dan lingkungan dalam konteks intrapersonal, interpersonal, organisasi dan massa agar efektif dan efisien. Dalam manajemen komunikasi harus jelas mengenai rencana yang dirancang kepada siapa yang ditujukan, dan apa yang diharapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, serta bagaimana jika rencana tersebut tidak berjalan lancar sesuai rencana.

4. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka awal dilakukan peneliti dengan meninjau penelitian sebelumnya beserta literatur jurnal mengenai strategi komunikasi. Berikut tinjauan pustaka penelitian dan jurnal tersebut:

- a. Jurnal E- Komunikasi Santi Yulia Wanata mahasiswa Universitas Kristen Petra Surabaya pada tahun 2013 yang berjudul Strategi Manajemen Konflik Interpersonal Pasangan Suami Istri (PASUTRI) yang Hamil Di Luar Nikah. Pada penelitiannya menggunakan metode kualitatif deskriptif bersifat studi kasus. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa

strategi komunikasi dalam menyelesaikan konflik adalah strategi penghindaran atau *avoidance*. Hal tersebut dilakukan karena adanya keragu-raguan mengenai kemampuannya untuk mengakhiri hubungan, takut menyakiti pasangannya, melindungi diri dari pertengkaran dan tidak ingin kehilangan pasangannya secara total. (sumber: <http://studentjournal.petra.ac.id/index.php/ilmu-komunikasi/article/viewFile/898/798>)

- b. Jurnal ilmiah komunikasi Nira Tabitha Gayle mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan Yuli Nugraheni staff pengajar sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya tahun 2012 berjudul Strategi Manajemen Konflik Pacaran Jarak Jauh. Pada penelitiannya menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat studi kasus. Tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitiannya komunikasi dalam hubungan jarak jauh sangatlah penting. Komunikasi merupakan satu faktor munculnya konflik selain kecemburuan. Strategi yang digunakan seperti strategi menang-kalah, menang-menang, *avoidance and fighting strategies, verbal aggressiveness and argumentativeness force and talk strategies*. (sumber: <file:///C:/Users/Mahasiswa10/Downloads/277-969-1-PB.pdf>)

Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti tidak jauh berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu mengenai bagaimana proses komunikasi yang dilakukan relawan saat menangani anak korban pencabulan dengan jenis

penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini bertujuan mengetahui strategi komunikasi relawan dalam menghadapi anak korban pencabulan dengan tahapan persiapan, perencanaan, pemanfaatan media, bentuk pesan, pemanfaatan waktu dan tempat, evaluasi serta tindak lanjut.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian Deskriptif

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang tidak mencari atau menjelaskan hubungan, serta tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata dan gambar yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2002 : 6).

Menurut Nazir (1988:63) bahwa metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Pendapat tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Neuman (2000:22) bahwa hasil dari penelitian deskriptif adalah gambaran yang detil dari suatu fenomena yang diteliti. Contohnya, temuan penelitian deskriptif yang mampu menggambarkan jumlah persentase tertentu, misalkan bahwa 10 persen orang tua terlibat dalam kekerasan fisik atau seksual terhadap anak-anak mereka.

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, misalnya perceraian, pengangguran, keadaan gizi, preferensi terhadap politik tertentu, dan lain-lain. Dalam hal ini peneliti mengembangkan konsep dan menghibun fakta, tetapi tidak melalui pengujian hipotesa. (Singarimbun, 1995 : 4).

2. Informan Penelitian

Informan menurut Moleong (2006:132) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, dia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Menurut Krisyanto (2007:154) sampling purposif yaitu teknik yang mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria, sedangkan orang-orang dalam populasi yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut tidak dijadikan sampel. Persoalan utama dalam menentukan kriteria, dimana kriteria harus mendukung tujuan penelitian. Biasanya teknik purposif dipilih untuk penelitian yang lebih mengutamakan kedalaman data, dari pada untuk tujuan representatif yang dapat digeneralisasikan.

Menurut Sugiyono (2009:85-221) purposif sampel adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi

yang maksimum. Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis memilih informan khususnya untuk relawan yang melakukan ditahap pengalihan informasi terhadap korban yang memiliki kriteria tersendiri yaitu:

- a. Memiliki pengalaman dalam menangani kasus usia anak. Minimal sudah menangani 30 kasus anak,
- b. Mereka yang terlibat secara langsung dalam kasus anak,
- c. Mengetahui dan memahami prosedur dalam penanganan kasus anak,
- d. Memiliki cukup waktu untuk dimintai keterangan untuk penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Cara merujuk pada sesuatu yang abstrak, tetapi dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi hanya dapat dipertontonkan penggunaannya (Arikunto, 2005:100). Penelitian ini menggunakan satu macam teknik untuk melakukan pengumpulan data, yaitu teknik wawancara mendalam. Menurut Deddy Mulyana (2004 : 180) wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang yang lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.

Adapun menurut Nazir (1999 : 234) pengumpulan data dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan dengan alat yang dinamakan panduan wawancara (*interview guide*). Wawancara mendalam di dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

jenis pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka atau pertanyaan tidak berstruktur adalah pertanyaan yang dibuat sedemikian rupa sehingga responden mempunyai kebebasan dalam menjawab pertanyaan terbuka. Berdasarkan teori-teori yang diungkapkan para pakar tersebut, maka peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data dalam penelitiannya yaitu:

a) Wawancara Mendalam

Dalam teknik pengumpulan menggunakan wawancara hampir sama dengan kuesioner. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Namun disini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi, Sulisty-Basuki (2006:173). Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta izin kepada informan untuk menggunakan alat perekam. Sebelum dilangsungkan wawancara mendalam, peneliti menjelaskan atau memberikan sekilas gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian.

b) Observasi

Untuk dapat melakukan observasi dengan baik, peneliti harus memahami bentuk atau jenis observasi, sehingga mendapatkan data yang akurat sesuai apa yang sebenarnya terjadi di lapang. Ada beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan. Menurut Spradley (1980) dalam jurnal (Aunu Rofiq Djaelani, 2013:85) membagi partisipasi atau keterlibatan peneliti menjadi empat yaitu; (1) partisipasi pasif yaitu peneliti datang mengamati tetapi tidak ikut terlibat kegiatan yang diamati; (2) partisipasi moderat yaitu peneliti kadang ikut aktif terlibat kegiatan kadang tidak aktif; (3) partisipasi aktif yaitu peneliti terlibat aktif dalam kegiatan yang diteliti; (4) partisipasi lengkap yaitu peneliti sudah sepenuhnya terlibat sebagai orang dalam, sehingga tidak kelihatan sedang melakukan penelitian. Untuk mendapatkan data yang akurat sebaiknya menggunakan observasi dengan partisipasi lengkap, karena sebagai orang dalam peneliti leluasa mengamati dan mendapatkan makna sesungguhnya dari apa yang diamati.

Menurut Mustofa (2008:56) metode observasi adalah metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. Dalam arti luas observasi dapat diartikan sebagai pengamatan yang dilakukan secara tidak langsung melalui media atau peralatan yang sudah disediakan. Dalam penelitian ini akan dilakukan pengamatan secara langsung terkait proses produksi pola komunikasi konseling antara relawan dengan korban kekerasan pencabulan terhadap anak.

c) Dokumentasi

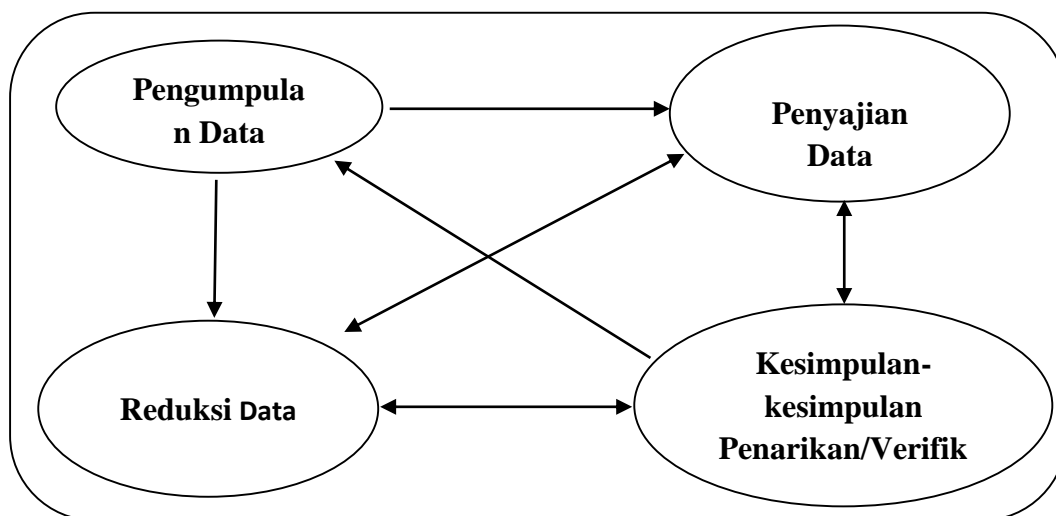
Dokumen menurut Sugiyono, (2009:240) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai proses dalam penanganan korban kekerasan terhadap anak yang didapat dari lembaga “Rekso Dyah Utami”. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto.

4. Tehnik Analisis Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan oleh Sugiyono (2009:225) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi.

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:14) Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh kedalam sebuah kategori, menjabarkan data kedalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami. Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut:

Gambar 1. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14)

Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut:

a) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.

b) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk CW (Catatan Wawancara), CL

(Catatan Lapangan) dan CD (Catatan Dokumentasi). Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Masing-masing data yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.

c) Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal

5. Uji Validitas Data

Teknik yang dilakukan dalam validitas data yaitu dengan teknik triangulasi. Menurut Moelong (2000:178) triangulasi adalah teknik pemeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Selain itu teknik ini juga digunakan untuk menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Menurut Denzin dalam Moelong (2000:178) triangulasi dibedakan menjadi empat macam

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber sebagai teknik triangulasi. Menurut Patton dalam Lexy J. Moelong (2000:178) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal tersebut dapat dicapai dengan jalan:

- a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d) Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berda, orang pemerintahan.
- e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Terkait dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan oleh peneliti yaitu metode membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Metode tersebut sangat cocok dengan situasi dan kondisi dilapangan, karena yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah pola komunikasi yang dibangun oleh relawan dengan korban kekerasan pencabulan terhadap anak.